

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi RENJA OPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA OPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis OPD. Dengan demikian, RENJA OPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA OPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan RENJA OPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Renja OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 merupakan penjabaran tahun Pertama dari Rencana Pembangunan lima tahunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021. Penyusunan Renja OPD Tahun 2021 juga didasarkan dan mengacu pada kebijakan pembangunan tahapan lima tahun kelima Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025. Renja Tahun 2021 ini diharapkan akan dapat mengantisipasi terhadap permasalahan yang akan dihadapi dengan

memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga adalah :

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomo 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009);
 7. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Kabupaten Purbalingga;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Purbalingga;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 08 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Purbalingga;
 10. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 26 Tahun 2011 tanggal 03 Januari 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 selaras dengan maksud dan tujuan rencana strategis yaitu penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi :

- a) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga;

- b) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga;
- c) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga.

1.3.1 Maksud

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di Bidang Penanggulangan Bencana Alam, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan tahun 2021 dapat tercapai.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan.
4. Menjadi kerangka dasar dalam upaya penanggulangan bencana alam.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :

- a) Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- b) Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LAKIP);

- c) Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
- d) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- e) Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Seksi-Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja, output, outcome

dan pendanaan yang sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

Lampiran

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Pada Tahun Anggaran 2019 terdapat dua (2) program dan tiga belas (13) kegiatan yang menjadi urusan wajib Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (2019) sampai dengan triwulan IV periode November s.d. Desember 2019 berdasarkan target indikator kinerja, sebagai berikut :

1. Terdapat perubahan anggaran dikarenakan adanya kebijakan pemerintah di Kabupaten Purbalingga.
2. Perubahan anggaran tersebut sangat mendasar sehingga berpengaruh pada capaian program dan kegiatan, sehingga perlu untuk segera dilakukan penyesuaian / perubahan rencana kinerja.

3. Perubahan kegiatan sebagai berikut :

Atas perubahan anggaran keuangan secara langsung akan berpengaruh pada pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga, sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Akhir	Selisih +/-
1	Penyediaan bahan dan jasa perkantoran	232.000.000	232.000.000	(0)
2	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	150.000.000	150.000.000	(0)
3	Pemeliharaan sarana dan prasarana	250.000.000	246.000.000	(4.000.000)
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	60.000.000	150.000.000	(90.000.000)
5	Pendidikan dan pelatihan pegawai	10.000.000	10.000.000	(0)
6	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporakerja	10.000.000	6.050.000	(0)
7	Fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	25.000.000	25.000.000	(0)
8	Penanganan darurat bencana	512.718.000	728.718.000	(200.000.000)
9	Fasilitasi pusat pengendalian operasi (PUSDALOPS)	370.000.000	370.000.000	(0)
10	Pembentukan Desa Tangguh Bencana	100.000.000	96.000.000	(4.000.000)
11	Pelatihan, Simulasi Penanganan dan Sosialisasi Budaya Sadar Bencana	100.000.000	94.000.000	(5.500.000)
12	Fasilitasi Sewa Lahan Antena Repeater	6.500.000	6.500.000	(0)
13	Penyusunan Kajian Resiko Bencana		60.000.000	(60.000.000)

4. Realisasi keuangan atas perubahan anggaran keuangan secara langsung akan berpengaruh pada pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga, sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Akhir	Selisih +/-
----	---------	----------	-----------	------------	-------------

1.	Penguatan kelembagaan perangkat daerah		798.000.000		
		Penyediaan bahan dan jasa perkantoran	232.000.000	211.572.177	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	150.000.000	149.416.723	
		Pemeliharaan sarana dan prasarana kntor	246.000.000	238.339.674	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	150.000.000	149.480.000	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	10.000.000	9.511.250	
		Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja SKPD	10.000.000	9.585.500	
2	Penanggulangan Bencana		1.380.718.000		
		Fasilitas rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	25.000.000	22.592.000	
		Penanganan darurat bencana	728.718.000	707.195.873	
		Fasilitas pusat pengendalian operasi (PUSDALOPS)	370.000.000	357.230.071	
		Pembentukan Desa Tangguh Bencana	96.000,000	88.606.000	
		Pelatihan, Simulasi Penanganan dan Sosialisasi Budaya Sadar Bencana	94.500.000	82.833.000	
		Fasilitas Sewa Lahan Antena Repeater	6.500.000	6.150.000	
		Penyusunan Kajian Resiko Bencana	60.000.000	60.000.000	

5. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Faktor Penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan:

- Kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai dikarenakan adanya refocusing anggaran penanganan Covid-19
- Kegiatan Mitigasi bencana dikarenakan adanya refocusing anggaran penanganan Covid-19

6. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Rensta Perangkat Daerah

Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga, implikasi yang timbul adalah:

- a. Belum optimalnya penggunaan peralatan dan terpenuhinya kebutuhan peralatan dan logistik.
- b. Belum ada peningkatan Desa Tangguh Bencana yang terbentuk.
- c. Belum optimalnya penanganan darurat bencana.

7. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

- a. Mengoptimalkan penggunaan peralatan dan terpenuhinya kebutuhan peralatan dan logistik.
- b. Meningkatkan jumlah Desa dan Masyarakat yang tangguh bencana.
- c. Meningkatkan penanganan darurat bencana.

T-C.29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (tahun berjalan: 2020 - saat penetapan Renja 2021)
Kabupaten Purbalingga**

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun n - 2021 (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2020 (Renja PD)			Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2020 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target tahun n-1- 2021 (Renstra PD)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2020 (Renstra PD)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/9)
01-05-01	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100	100	100	100	100%	100	100	100%

01-05-01-2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100							
01-05-01-2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan	2	2	1	1	100	1	1	100
01-05-01-2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja PD	6	5	5	5	100	5	5	100
01-05-01-2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100							
01-05-01-2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	14	13	13	13	100	13	13	100
01-05-01-2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah fasilitasi administrasi pelaksanaan tugas ASN	37	33	33	33	100	35	34	100

01-05-01-2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya honor pengelola keuangan, pemeriksa hasil pekerjaan, pejabat pengadaan, honor operator komputer	14	13	13	13	100	13	13	100
01-05-01-2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Jenis Laporan Prognosis	98	75	78	78	100	84	79	100
01-05-01-2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Kepegawaian PD	100	100	100	100	100	100	100	100
01-05-01-2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah jenis pakaian dinas yang disediakan	34	33	33	33	100	35-	34	96
	Pengadaan pakaian olahraga	jumlah pakaian olahraga yang tersedia	34	-	-	-	-	-	-	-

01-05-01-2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN terfasilitasi pendidikan dan pelatihan	5	5	5	5	100	5	5	100
01-05-01-2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN terfasilitasi Bimtek regulasi kepegawaian	5	5	5	5	100	5	5	100
01-05-01-2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Umum PD	100	100	100	100	100	100	100	100
01-05-01-2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan	37	33	33	33	100	35	34	100
01-05-01-2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	12	12	12	12	100	12	12	100
01-05-01-2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya jasa cetak dan penggandaan	3500	3500	3500	3500	100	3500	3500	100
01-05-01-2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar/majalah	12	12	12	12	100	12	12	100

01-05-01-2.06.07	Penyediaan bahan / Material	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	34	34	34	34	100	34	34	100
01-05-01-2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	tersedianya jamuan tamu	12	12	12	12	100	12.	12	100
01-05-01-2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	tersedianya jamuan rakor SKPD	12	12	12	12	100	12	12	100
01-05-01-2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	100	100	100	100	100	100	100	100
01-05-01-2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya pengadaan mebel	0	1	-	-	-	-	-	-
01-05-01-2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tersedianya pengadaan peralatan dan mesin	3	1	9	9	100	3	3	100
	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	tersedianya pengadaan sarana dan prasarana kantor	24	5		-	-	12	8	47

01-05-01-2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100	100	100	100	100	100	100	100
01-05-01-2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah fasilitas jasa surat menyurat	12	12	12	12	100	12	12	100
01-05-01-2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening yang dibayar (bulan)	12	12	12	12	100	12	12	100
01-05-01-2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah fasilitas jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	12	12	12	12	100	12	12	100
01-05-01-2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas pemeliharaan BMD	100	100	100	100	100	100	100	100

01-05-01-2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/la pangan yang dipelihara	20	20	20	20	100	20	20	100
01-05-01-2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lain yang dipelihara	40	30	30	30	100	40	33	100
	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1	1	1	1	100	1	1	100
01-05-03	Program Penanggulangan Bencana	Prosentase Tingkat Ketahanan Daerah	0,51	0,49	0,50	0,50	100	0,51	0,51	98
1-05-03-2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	Prosentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	100	100	100	100	100	100	100	100-

1-05-03-2.01-01	Penyusunan KRB	Presentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal	100	100	100	100	100	100	100	100
1-05-03-2.01-02	Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana Kab / Kota (per jenis bencana)	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100	100	100	100	100	100	100	100
1-05-03-2.02	Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Prosentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100	100	100	100	100	100	100	100

1-05-03-2.02-01	Penyusunan rencana penanggulangan bencana kab/kota	Presentase Penyusunan rencana penanggulangan bencana kab/kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	-	-	-	-	-	-	-	-
1-05-03-2.02-02	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kab / Kota	Presentase jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan	100	100	100	0	0	100	67	67
1-05-03-2.02-03	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kab / Kota	Presentase jumlah Warga Negara yang mendapatkan layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100	100	100	100	100	100	100	100
1-05-03-2.02-04	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Presentase jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan	100	100	100	100	100	100	100	100

1-05-03-2.02-07	Penanganan Pasca Bencana Kab / Kota	Presentase penanganan pasca bencana berupa assesment perencanaan pemulihan sarpras yang rusak akibat bencana	100	100	100	100	100	100	100	100
1.05.03-2-02-09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Presentase penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah	-	-	-	-	-	-	-	-
1-05-03-2.03	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Prosentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100							
1-05-03-2.03-02	Respon cepat darurat bencana Kab / Kota	Presentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100	100	100	100	100	100	100	100

1-05-03-2.03-03	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kab / Kota	presentase jumlah korban bencana yang berhasil dicari, ditolong, dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100	100	100	100	100	100	100	100
1-05-03-2.03-04	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kab / Kota	Presentase logistik penyelamatan dan evakuasi kerban bencana Kab/Kota yang tersedia	100	100	100	100	100	100	100	100
1-05-03-2.03-05	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Presentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100	100	100	100	100	100	100	100
1-05-03-2.04	Penetapan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Presentase Penetapan Sistem Dasar Penanggulang an Bencana	100							
1-05-03-2.04-01	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana kab/kota	Presentase Penyusunan regulasi penanggulang an bencana kab/kota	100	100	100	100	100	100	100	100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga yang telah tertuang dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026. Berikut tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format tabel T-C.30.

T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Purbalingga

NO	Indikator Tujuan / Sasaran Renstra PD	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2019	Tahun 2020 (perkiraan)	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Capaian Indikator Tingkat Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Presentase ketahanan daerah dalam menghadapi bencana		0,48	0,48	0,49	0,50	0,50	0,51	0,51	0,52	
		Prosentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		32	33	35	40	33	34	35	37	
		Prosentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		100	100	100	100	100	100	100	100	

Dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sesuai hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Perangkat Daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah maupun hasil kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah, maka selanjutnya dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan untuk menentukan peluang dan tantangan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

1. Melakukan koordinasi antara BPBD Kabupaten Purbalingga dengan Dinas/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan melakukan koordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Tengah agar ada keselarasan dalam hal program pembangunan dan penanggulangan bencana melalui pelatihan-pelatihan pengembangan sumber daya manusia, sosialisasi terkait kebencanaan, pembinaan dan pembentukan Desa Tangguh Bencana, penanganan darurat bencana, bantuan penanganan bencana termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

2. Permasalahan dan Hambatan

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya tersebut, BPBD Kabupaten Purbalingga menghadapi beberapa permasalahan, kendala maupun hambatan yang menyebabkan kurang optimalnya

penyelenggaraan ketugasan BPBD Kabupaten Purbalingga terutama pada mitigasi bencana, diantaranya:

Tabel 2.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mitigasi bencana belum optimal	1. Kebutuhan untuk penanggulangan bencana belum memadai	1. Terbatasnya peralatan dan perlengkapan logistik penanggulangan bencana 2. Terbatasnya persediaan bahan logistik penanggulangan bencana
		2. Sumber Daya Masyarakat masih rendah terhadap bencana	1. Belum dibentuknya desa tangguh di semua desa rawan bencana 2. Jarak Tempuh di daerah rawan bencana cukup sulit dijangkau 3. Sumber daya aparatur yang terbatas 4. Partisipasi masyarakat terkait kebencanaan masih cukup rendah

3. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menyikapi adanya hambatan dan permasalahan di dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, maka BPBD Kabupaten Purbalingga berupaya semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan semua sumber daya yang ada untuk meminimalkan hambatan dan permasalahan yang dihadapi, dengan membuat kelemahan-kelemahan maupun hambatan yang ada menjadi peluang dan tantangan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran BPBD Kabupaten Purbalingga.

Faktor-faktor yang mempengaruhi:

a. Faktor Internal:

1) Kekuatan:

- Adanya peraturan perundang-undangan yang bersifat Nasional maupun Daerah (Perda) yang telah mengatur

tentang pembentukan BPBD, pelaksanaan Pencegahan kesiapsiagaan dan logistik bencana maupun penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana.

- Adanya dukungan yang cukup dari Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan program-program kegiatan.
- Kerjasama dan koordinasi yang cukup baik antara BPBD Kabupaten Purbalingga dengan Dinas/Instansi terkait baik secara vertikal maupun horizontal..

2) Kelemahan:

- Terbatasnya peralatan dan perlengkapan logistik penanggulangan bencana.
- Terbatasnya persediaan bahan logistik penanggulangan bencana.
- Sumber daya aparatur yang berbasis kompetensi teknis dibidang bencana terbatas.

b. Faktor Eksternal:

1) Peluang

- Pembentukan dan pengembangan desa tangguh dalam rangka pengurangan risiko bencana.
- Pemasangan Early Warning System (EWS) di kawasan rawan bencana.
- Optimalisasi peran Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Purbalingga.
- Pembuatan dokumen Kajian Resiko Bencana.
- Pembuatan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana.
- Pembuatan dokumen rencana kontijensi
- Penanganan keadaan darurat yang responsif.
- Perencanaan pemulihan pasca bencana.
- Mengadakan kerja sama dengan Kabupaten / wilayah perbatasan terkait dengan pengurangan risiko bencana.

2) Tantangan

Tingkat risiko bencana Kabupaten Purbalingga didapat dengan menggabungkan indeks ancaman, kerentanan serta kapasitas suatu daerah terhadap suatu bencana tertentu.

4. Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis Berikut ini isu-isu penting dari perubahan lingkungan eksternal yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga :

- a) Kabupaten Purbalingga memiliki 1 Gunung yang masih aktif yaitu Gunung Slamet.
- b) Perubahan cuaca ekstrim yang terjadi secara mendadak yang sering mengakibatkan terjadinya lonsor, banjir dan angin kencang / puting beliung.
- c) Masih terdampaknya kekeringan di 15 Kecamatan 105 Desa (data kejadian tahun 2019).
- d) Peningkatan partisipasi dan pengetahuan masyarakat tentang penanggulangan bencana.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Bahwasanya Rencana Kinerja Tahunan OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga tetap mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga, dengan uraian sebagai berikut :

T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021
Kabupaten Purbalingga

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga

KODE	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01-05-01	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100	2,533,450,000	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100	2,533,450,000	
01-05-01-2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100	12,500,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100	12.500.000	
01-05-01-2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPBD	Jumlah jenis dokumen perencanaan	2	7,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPBD	Jumlah jenis dokumen perencanaan	2	7,000,000	

01-05-01-2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPBD	Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja PD	6	5,500,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPBD	Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja PD	6	5,500,000	
01-05-01-2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	1,606,500,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	1,606,500,000	
01-05-01-2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Purbalingga	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	14	1,450,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Purbalingga	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	14	1,450,000,000	
01-05-01-2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Purbalingga dan Luar Daerah	Jumlah fasilitasi administrasi pelaksanaan tugas ASN	37	85,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Purbalingga dan Luar Daerah	Jumlah fasilitasi administrasi pelaksanaan tugas ASN	37	85,000,000	
01-05-01-2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPBD	Tersedianya honor pengelola keuangan, pemeriksa hasil pekerjaan, pejabat pengadaan, honor operator komputer	14	65,000,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPBD	Tersedianya honor pengelola keuangan, pemeriksa hasil pekerjaan, pejabat pengadaan, honor operator komputer	14	65,000,000	

01-05-01-2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	BPBD	Jumlah Jenis Laporan Prognosis	98	6,500,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	BPBD	Jumlah Jenis Laporan Prognosis	98	6,500,000	
01-05-01-2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	100	39,050,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	100	39,050,000	
01-05-01-2.05.02	Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	BPBD	Jumlah jenis pakaian yang disediakan	34	18,500,000	Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	BPBD	Jumlah jenis pakaian yang disediakan	37	18,500,000	
	Pengadaan pakaian Olahraga	BPBD	Jumlah Pakaian Olahraga yang disediakan	34	5,550,000	Pengadaan pakaian Olahraga	BPBD	Jumlah Pakaian Olahraga yang disediakan	37	5,550,000	
01-05-01-2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BPBD	Jumlah ASN terfasilitasi pendidikan dan pelatihan	5	10,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BPBD	Jumlah ASN terfasilitasi pendidikan dan pelatihan	5	10,000,000	
01-05-01-2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BPBD	Jumlah ASN terfasilitasi Bimtek regulasi kepegawaian	5	5,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BPBD	Jumlah ASN terfasilitasi Bimtek regulasi kepegawaian	5	5,000,000	

01-05-01-2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase fasilitas Administrasi Umum PD	100	195,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase fasilitas Administrasi Umum PD	100	195,000,000	
01-05-01-2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPBD	Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan	37	2,500,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPBD	Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan	37	2,500,000	
01-05-01-2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPBD	Jumlah bahan ogistic kantor yang disediakan	12	159,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPBD	Jumlah bahan ogistic kantor yang disediakan	12	159,000,000	
01-05-01-2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPBD	Teredianya jasa cetak dan penggandaan	3500	2,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPBD	Teredianya jasa cetak dan penggandaan	7000	2,000,000	
01-05-01-2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BPBD	Tersedianya surat kabar/majalah	12	2,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BPBD	Tersedianya surat kabar/majalah	288	2,000,000	
01-05-01-2.06.07	Penyediaan bahan / Material	BPBD	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	34	12,500,000	Penyediaan bahan / Material	BPBD	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	34	12,500,000	
01-05-01-2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	BPBD	tersedianya jamuan tamu	12	5,000,000	Fasilitas Kunjungan Tamu	BPBD	tersedianya jamuan tamu	12	5,000,000	

01-05-01-2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPBD	tersedianya jamuan rakor SKPD	12	12,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPBD	tersedianya jamuan rakor SKPD	12	12,000,000	
01-05-01-2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase fasilitas pengadaan BMD	100	519,400,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase fasilitas pengadaan BMD	100	519,400,000	
01-05-01-2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	BPBD	Tersedianya pengadaan peralatan dan mesin	3	21,400,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	BPBD	Tersedianya pengadaan peralatan dan mesin	6	21,400,000	
	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	BPBD	tersedianya pengadaan sarana dan prasarana kantor	24	498,000,000	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	BPBD	tersedianya pengadaan sarana dan prasarana kantor	4	498,000,000	
01-05-01-2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPBD	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100	51,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPBD	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100	51,000,000	
01-05-01-2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPBD	Jumlah fasilitas jasa surat menyurat	12	1,500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPBD	Jumlah fasilitas jasa surat menyurat	12	1,500,000	
01-05-01-2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	BPBD	jumlah rekening yang dibayar	12	41,500,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPBD	jumlah rekening yang dibayar	12	41,500,000	

	Air dan Listrik										
01-05-01-2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPBD	Jumlah fasilitasi jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	12	8,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPBD	Jumlah fasilitasi jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	12	8,000,000	
01-05-01-2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPBD	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	100	110,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPBD	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	100	110,000,000	
01-05-01-2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPBD	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	20	79,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPBD	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	20	79,000,000	
01-05-01-2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPBD	Jumlah jenis peralatan dan mesin lain yang dipelihara	40	11,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPBD	Jumlah jenis peralatan dan mesin lain yang dipelihara	7	11,000,000	

	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	BPBD	terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1	20,000,000	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor		terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1	20,000,000	
01-05-03	Program Penanggulangan Bencana		Prosentase Tingkat Ketahanan Daerah	0,51	3,345,000,000	Program Penanggulangan Bencana		Prosentase Tingkat Ketahanan Daerah	67,5	3,345,000,000	
1-05-03-2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota		Prosentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	100	620,000,000	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota		Prosentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	100	620,000,000	
1-05-03-2.01-01	Penyusunan KRB	BPBD	Presentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal	100	550,000,000	Penyusunan KRB	BPBD	Presentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal	100	550,000,000	

1-05-03-2.01-02	Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana Kab / Kota (per jenis bencana)	Kab. Purbalingga	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100	70,000,000	Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana Kab / Kota (per jenis bencana)	Kab. Purbalingga	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100	70,000,000	
1-05-03-2.02	Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	BPBD	Prosentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100	1,797,000,000	Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	BPBD	Prosentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100	1,797,000,000	
1-05-03-2.02-01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	BPBD	Presentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal	100	190,000,000	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	BPBD	Presentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal	100	190,000,000	
1-05-03-2.02-02	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kab / Kota	Kecamatan Kaligondang, Pangadegan	Presentase jumlah aparaturnya dan Warga Negara yang ikut pelatihan	100	500,000,000	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kab / Kota	Kecamatan Kaligondang, Pangadegan	Presentase jumlah aparaturnya dan Warga Negara yang ikut pelatihan	100	500,000,000	

1-05-03-2.02-03	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kab / Kota	BPBD	Presentase jumlah Warga Negara yang mendapatkan layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100	970,000,000	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kab / Kota	BPBD	Presentase jumlah Warga Negara yang mendapatkan layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100	970,000,000	
1-05-03-2.02-04	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	BPBD	Presentase jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan	100	12,000,000	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	BPBD	Presentase jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan	100	12,000,000	
1-05-03-2.02-07	Penanganan Pasca Bencana Kab / Kota	BPBD	Presentase penanganan pasca bencana berupa assesment perencanaan pemulihan sarpras yang rusak akibat bencana	100	25,000,000	Penanganan Pasca Bencana Kab / Kota	BPBD	Presentase penanganan pasca bencana berupa assesment perencanaan pemulihan sarpras yang rusak akibat bencana	100	25,000,000	

1.05-03-2-02-09	Penyusunan Rencana Kontijensi	BPBD	Presentase penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah	100	100,000,000	Penyusunan Rencana Kontijensi	BPBD	Presentase penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah	100	100,000,000	
1-05-03-2.03	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		Prosentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	908,000,000	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		Prosentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	908,000,000	
1-05-03-2.03-02	Respon cepat darurat bencana Kab / Kota	18 Kecamatan	Presentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100	68,000,000	Respon cepat darurat bencana Kab / Kota	18 Kecamatan	Presentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100	68,000,000	
1-05-03-2.03-03	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kab / Kota	18 Kecamatan	presentase jumlah korban bencana yang berhasil dicari, ditolong, dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100	260,000,000	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kab / Kota	18 Kecamatan	presentase jumlah korban bencana yang berhasil dicari, ditolong, dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100	260,000,000	

1-05-03-2.03-04	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kab / Kota	BPBD	Presentase logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kab/Kota	100	450,000,000	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kab / Kota	BPBD	Presentase logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kab/Kota	100	450,000,000	
1-05-03-2.03-05	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Lokasi bencana	Presentase jumlah petugas yang aktif dalam penanggulangan darurat bencana	100	130,000,000	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Lokasi bencana	Presentase jumlah petugas yang aktif dalam penanggulangan darurat bencana	100	130,000,000	
1-05-03-2.04	Penataan sistem dasar penanggulangan bencana	BPBD	Presentase Penataan sistem dasar penanggulangan bencana	100	20,000,000	Penataan sistem dasar penanggulangan bencana	BPBD	Presentase Penataan sistem dasar penanggulangan bencana	100	20,000,000	
1-05-03-2.04-01	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana kab/kota	BPBD	Presentase penyusunan regulasi hingga dinyatakan sah/legal	100	20,000,000	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana kab/kota	BPBD	Presentase penyusunan regulasi hingga dinyatakan sah/legal	100	20,000,000	
JUMLAH					5,878,450,000	JUMLAH					5,878,450,000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Pemangku Kepentingan

Rekapitulasi usulan program dan kegiatan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan urusan penanggulangan bencana disajikan dalam Tabel T-C.32 berikut :

T-C.32**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021**

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01-05-01	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100	
01-05-01-2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100	
01-05-01-2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPBD	Jumlah jenis dokumen perencanaan	2	
01-05-01-2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPBD	Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja PD	6	
01-05-01-2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	
01-05-01-2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Purbalingga	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	14	
01-05-01-2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Purbalingga dan Luar Daerah	Jumlah fasilitasi administrasi pelaksanaan tugas ASN	37	
01-05-01-2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPBD	Tersedianya honor pengelola keuangan, pemeriksa hasil pekerjaan, pejabat pengadaan, honor operator komputer	14	
01-05-01-2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	BPBD	Jumlah Jenis Laporan Prognosis	98	

01-05-01-2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	100	
01-05-01-2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BPBD	Jumlah jenis pakaian dinas yang tersedia	34	
	Pengadaan pakaian olahraga	BPBD	jumlah pakaian olahraga yang tersedia	34	
01-05-01-2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BPBD	Jumlah ASN terfasilitasi pendidikan dan pelatihan	5	
01-05-01-2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BPBD	Jumlah ASN terfasilitasi Bimtek regulasi kepegawaian	5	
01-05-01-2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	100	
01-05-01-2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPBD	Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan	37	
01-05-01-2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPBD	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	12	
01-05-01-2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPBD	Tersedianya jasa cetak dan penggandaan	3500	
01-05-01-2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BPBD	Tersedianya surat kabar/majalah	12	
01-05-01-2.06.07	Penyediaan bahan / Material	BPBD	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	34	
01-05-01-2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BPBD	tersedianya jamuan tamu	12	
01-05-01-2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPBD	tersedianya jamuan rakor SKPD	12	
01-05-01-2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase fasilitasi pengadaan BMD	100	
01-05-01-2.07.05	Pengadaan Mebel	BPBD	Tersedianya pengadaan mebel		
01-05-01-2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	BPBD	Tersedianya pengadaan peralatan dan mesin	3	

	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	BPBD	tersedianya pengadaan sarana dan prasarana kantor	24	
01-05-01-2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPBD	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100	
01-05-01-2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPBD	Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat	12	
01-05-01-2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPBD	jumlah rekening yang dibayar	12	
01-05-01-2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPBD	Jumlah fasilitasi jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	12	
01-05-01-2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPBD	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	100	
01-05-01-2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPBD	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	20	
01-05-01-2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPBD	Jumlah jenis peralatan dan mesin lain yang dipelihara	40	
	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	BPBD	terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1	
01-05-03	Program Penanggulangan Bencana		Prosentase Tingkat Ketahanan Daerah	0,51	
1-05-03-2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota		Prosentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	100	
1-05-03-2.01-01	Penyusunan KRB	BPBD	Presentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal	100	
1-05-03-2.01-02	Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana Kab / Kota (per jenis bencana)	Kecamatan Kaligondang, Pangadegan	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100	

1-05-03-2.02	Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	BPBD	Prosentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100	
1-05-03-2.02-01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	BPBD	Presentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal	100	
1-05-03-2.02-02	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kab / Kota	Kecamatan Kaligondang, Pangadegan	Presentase jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan	100	
1-05-03-2.02-03	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kab / Kota	BPBD	Presentase jumlah Warga Negara yang mendapatkan layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100	
1-05-03-2.02-04	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	BPBD	Presentase jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan	100	
1-05-03-2.02-07	Penanganan Pasca Bencana Kab / Kota	BPBD	Presentase penanganan pasca bencana berupa assesment perencanaan pemulihan sarpras yang rusak akibat bencana	100	
1.05.03-2-02-09	Pembuatan Rencana Kontijensi	BPBD	Presentase penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah	100	
1-05-03-2.03	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		Prosentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	
1-05-03-2.03-02	Respon cepat darurat bencana Kab / Kota	18 Kecamatan	Presentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100	
1-05-03-2.03-03	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kab / Kota	18 Kecamatan	presentase jumlah korban bencana yang berhasil dicari, ditolong, dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100	

1-05-03-2.03-04	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kab / Kota	BPBD	Presentase logistik penyelamatan dan evakuasi kerban bencana Kab/Kota	100	
1-05-03-2.03-05	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Lokasi bencana	Presentase jumlah petugas yang aktif dalam penanggulangan darurat bencana	100	
1-05-03-2.04	Penataan sistem dasar penanggulangan bencana	BPBD	Presentase Penataan sistem dasar penanggulangan bencana	100	
1-05-03-2.04-01	Penyusunan regulasi penanggulangan benana kab/kota	BPBD	Presentase penyusunan regulasi hingga dinyatakan sah/legal	100	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

a. Arah Kebijakan Nasional Bidang Penanggulangan Bencana

Rencana aksi nasional merupakan penjabaran Renas PB 2018-2023 secara operasional dari program, fokus prioritas, sasaran dan indikator. Rencana aksi ini sudah merupakan komitmen K/L dan non-K/L terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dengan demikian rencana aksi baru dapat menjadi sebuah dokumen final setelah dilakukannya renstra K/L yang memunculkan indikator.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada saat tidak terjadi bencana, saat terjadi bencana, dan pascabencana. Dalam pembuatan perencanaan penanggulangan bencana yang terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN), kegiatan perencanaan penanggulangan bencana yang paling dapat dikaitkan dengan SPPN adalah perencanaan penanggulangan bencana pada saat tidak terjadi bencana. Hal ini kemudian mewujudkan dalam bentuk Renas PB dan rencana aksi pengurangan risiko bencana. Rencana aksi pengurangan risiko bencana secara spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Pasal 8 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan bahwa untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana dilakukan penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana. Beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana antara lain:

1. Rencana aksi pengurangan risiko bencana disusun baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.
2. Di tingkat nasional, rencana aksi pengurangan risiko bencana disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi

unsur dari pemerintah, non pemerintah, masyarakat, dan lembaga usaha yang dikoordinasikan oleh BNPB.

3. Rencana aksi nasional ditetapkan oleh Kepala BNPB setelah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan nasional.
4. Rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

Peningkatan upaya-upaya penanggulangan bencana, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai monitoring dan evaluasi dari berbagai aspek dan tahapan penanggulangan bencana terus dilakukan secara sistematis dan holistik oleh BNPB sebagai pemegang utama mandat UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Hal ini juga tidak terlepas dalam upaya penyusunan Renas PB 2018-2023 beserta dengan rencana aksi sebagai acuan implementasi bagi berbagai Kementerian / Lembaga serta para pemangku kepentingan terkait. Sejalan dengan hal ini, pendekatan dan landasan dasar dalam penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana untuk periode 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Landasan hukum: UU No 2 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta peraturan perundangan lain yang terkait sebagaimana dasar penyusunan Renas Penanggulangan Bencana.
2. Disusun dengan pendekatan partisipatif dan konsultatif dengan Bappenas serta Kementerian / Lembaga terkait (37 K/L), dan pemangku kepentingan terkait, termasuk mitra pembangunan internasional, swasta, media, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi serta Planas PRB.

b. Prioritas Pembangunan Nasional Bidang Penanggulangan Bencana

Sesuai dengan Pasal 33 UU No. 24/2007 bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap prabencana, saat

tanggap darurat dan pascabencana. Arah dan prioritas nasional sebagaimana ditegaskan pada RPJMN 2018-2023, pengkajian beragam dokumen seperti RPJMN 2009-2014, Renas PB 2010-2014, dan Rencana Aksi Nasional (RAN PRB) 2010-2012, serta memperhatikan capaian 5 (lima) tahun terakhir tentang penanggulangan bencana, baik yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat, maka fokus prioritas disusun dan dirumuskan sebagai berikut :

1. Penguatan kerangka hukum penanggulangan bencana.
2. Pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam pembangunan.
3. Peningkatan kemitraan multi pihak dalam penanggulangan bencana.
4. Pemenuhan tata kelola bidang penanggulangan bencana.
5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana.
6. Peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana.
7. Peningkatan kapasitas pemulihan bencana.

Adapun sasaran penanggulangan bencana, dirumuskan dan ditetapkan untuk tercapainya arah penanggulangan bencana sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2018-2023. Uraian mengenai keterkaitan antara program, fokus prioritas, dan sasaran penanggulangan bencana yang termuat dalam Renas PB 2018-2023 adalah sebagai berikut:

KETERKAITAN PROGRAM, FOKUS PRIORITAS DAN SASARAN PB

PROGRAM	FOKUS PRIORITAS	SASARAN PENANGGULANGAN BENCANA
(1)	(2)	(3)
Penanggulangan Bencana	1. Penguatan kerangka hukum penanggulangan bencana	1) Tersedianya perangkat hukum yang mendorong penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif dan mandiri di tingkat pusat hingga daerah secara proporsional

PROGRAM	FOKUS PRIORITAS	SASARAN PENANGGULANGAN BENCANA
(1)	(2)	(3)
	2. Pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam pembangunan	2) Terintegrasinya penanggulangan bencana pada kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan non pemerintah
		3) Meningkatnya efektivitas mekanisme penyelenggaraan penanggulangan bencana
	3. Peningkatan kemitraan multi pihak dalam penanggulangan bencana	4) Diterapkannya strategi yang menjamin terlaksananya pemberdayaan masyarakat secara sinergi yang berorientasi kepada penurunan risiko bencana dengan kearifan lokal dankemandirian daerah
		5) Meningkatnya kemitraan multi-pihak (pemerintah, lembaga usaha dan masyarakat sipil) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
	4. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana	6) Meningkatnya upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi potensi korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat bencana
	5. Peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana	7) Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan darurat untuk menghadapi bencana secara mandiri dan proaktif.
	6. Peningkatan kapasitas pemulihan bencana	8) Tersedianya mekanisme pendukung dalam menjamin terselenggaranya pemulihan dampak bencana secara mandiri, efektif dan bermartabat.
		9) Terselenggaranya pemulihan

PROGRAM	FOKUS PRIORITAS	SASARAN PENANGGULANGAN BENCANA
(1)	(2)	(3)
		dampak bencana secara lintas sektor sesuai dengan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
	7. Pemenuhan tata kelola bidang penanggulangan bencana	10) Meningkatnya kapasitas SDM serta kelembagaan pemerintah dan non pemerintah terkait penanggulangan bencana Untuk melaksanakan program tersebut, pemerintah sesuai dengan kewenangan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan tujuan dan indikator sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih.

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN
Terwujudnya Masyarakat yang Tangguh Bencana	Ketahanan daerah dalam menghadapi bencana

B. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

No.	TUJUAN	SASARAN	
		URAIAN	INDIKATOR
1	Mewujudkan Masyarakat yang Tangguh Bencana	Meningkatnya Capaian Indikator Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Persentase Capaian Indikator Tingkat Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan BPBD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 disusun dengan mengacu pada RKPD dan Renstra Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 serta dengan tetap memperhatikan hasil dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun-tahun yang lalu sehingga program dan kegiatan yang akan datang tetap berkesinambungan dari tahun ke tahun.

Pada Tahun 2021 BPBD Kabupaten Purbalingga merencanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - c. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - d. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
 - e. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 - f. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
 - g. Penyediaan Komponen dan Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - h. Penyediaan Peralatan Rumah tangga

- i. Penyediaan bahan logistic kantor
 - j. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - k. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
 - l. Penyediaan Bahan/ Material
 - m. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - n. Pengadaan Peralatan Mesin dan lainnya
 - o. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - p. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
 - q. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - r. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan
 - s. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
2. Program Penanggulangan Bencana
- a. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota.
 - b. Pelatihan pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota.
 - c. Pengendalian operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten / Kota.
 - d. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.
 - e. Penanganan Pasca Bencana Kabupaten / Kota
 - f. Respon Cepat darurat Bencana Kabupaten / Kota
 - g. Pencarian, Pertolongan dan evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota
 - h. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota

T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Kabupaten Purbalingga

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1-05-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				5,878,450,000				5,995,263,000
01-05-01	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran		100	2,533,450,000	DAU		100	2,583,019,000

01-05-01-2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitas dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		100	12,500,000	DAU		100	14,000,000
01-05-01-2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan	BPBD	2	7,000,000	DAU		2	8,000,000
01-05-01-2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja PD	BPBD	6	5,500,000	DAU		6	6,000,000
01-05-01-2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	1,606,500,000	DAU		100	1,618,325,000
01-05-01-2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	Kab. Purbalingga	14	1,450,000,000	DAU		14	1,450,000,000
01-05-01-2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah fasilitas administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kab. Purbalingga dan Luar Daerah	37	85,000,000	DAU		37	90,425,000
01-05-01-2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya honor pengelola keuangan, pemeriksa hasil pekerjaan, pejabat pengadaan, honor operator komputer	BPBD	14	65,000,000	DAU		14	70,760,000

01-05-01-2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Jenis Laporan Prognosis	BPBD	98	6,500,000	DAU	98	7,740,000
01-05-01-2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Kepegawaian PD		100	39,050,000	DAU	100	41,050,000
01-05-01-2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah jenis pakaian dinas yang disediakan	BPBD	34	18,500,000	DAU	34	18,500,000
	Pengadaan pakaian olahraga	jumlah pakaian olahraga yang tersedia	BPBD	34	5,550,000	DAU	34	5,550,000
01-05-01-2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN terfasilitasi pendidikan dan pelatihan	BPBD	5	10,000,000	DAU	5	12,000,000
01-05-01-2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN terfasilitasi Bimtek regulasi kepegawaian	BPBD	5	5,000,000	DAU	5	7,000,000
01-05-01-2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Umum PD		100	195,000,000	DAU	100	197,000,000
01-05-01-2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan	BPBD	37	2,500,000	DAU	37	2,910,000
01-05-01-2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	BPBD	12	159,000,000	DAU	12	160,544,000

01-05-01-2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Teredianya jasa cetak dan penggandaan	BPBD	3,500	2,000,000	DAU		3,500	2,100,000
01-05-01-2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar/majalah	BPBD	12	2,000,000	DAU		12	2,160,000
01-05-01-2.06.07	Penyediaan bahan / Material	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	BPBD	34	12,500,000	DAU		34	12,500,000
01-05-01-2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	tersedianya jamuan tamu	BPBD	12	5,000,000	DAU		12	5,000,000
01-05-01-2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	tersedianya jamuan rakor SKPD	BPBD	12	12,000,000	DAU		12	12,000,000
01-05-01-2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitas pengadaan BMD		100	519,400,000	DAU		100	529,400,000
01-05-01-2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya pengadaan mebel	BPBD	1		DAU		1	10,000,000
01-05-01-2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tersedianya pengadaan peralatan dan mesin	BPBD	3	21,000,000	DAU		6	498,000,000
	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	tersedianya pengadaan sarana dan prasarana kantor	BPBD	24	498,000,000	DAU		4	21,000,000
01-05-01-2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor	BPBD	100	51,900,000	DAU		100	51,900,000

01-05-01-2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah fasilitas jasa surat menyurat	BPBD	12	1,500,000	DAU	12	1,500,000
01-05-01-2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening yang dibayar	BPBD	12	41,500,000	DAU	12	42,000,000
01-05-01-2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah fasilitas jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	BPBD	12	8,000,000	DAU	12	8,400,000
01-05-01-2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas pemeliharaan BMD	BPBD	100	110,000,000	DAU	100	111,130,000
01-05-01-2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	BPBD	20	79,000,000	DAU	20	79,500,000
01-05-01-2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lain yang dipelihara	BPBD	40	11,000,000	DAU	40	11,630,000
	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	BPBD	1	20,000,000	DAU	1	20,000,000
01-05-03	Program Penanggulangan Bencana	Prosentase Tingkat Ketahanan Daerah		0,51	3,345,000,000	DAU	0,52	3,412,244,000
1-05-03-2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Prosentase Pelayanan		100	620,000,000	DAU	100	675,000,000

	Kabupaten / Kota	Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota							
1-05-03-2.01-01	Penyusunan KRB	Presentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal	BPBD	100	550,000,000	DAU		100	600,000,000
1-05-03-2.01-02	Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana Kab / Kota (per jenis bencana)	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Kecamatan Kaligondang, Pangadegan	100	70,000,000	DAU		100	75,000,000
1-05-03-2.02	Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Prosentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	BPBD	100	1,797,000,000	DAU		100	1,813,600,000
1-05-03-2.02-01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Presentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal	BPBD	100	190,000,000	DAU		100	196,000,000
1-05-03-2.02-02	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kab / Kota	Presentase jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan	Kecamatan Kaligondang, Pangadegan	100	500,000,000	DAU		100	500,000,000

1-05-03-2.02-03	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kab / Kota	Presentase jumlah Warga Negara yang mendapatkan layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	BPBD	100	970,000,000	DAU	100	980,100,000
1-05-03-2.02-04	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Presentase jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan	BPBD	100	12,000,000	DAU	100	12,500,000
1-05-03-2.02-07	Penanganan Pasca Bencana Kab / Kota	Presentase penanganan pasca bencana berupa assesment perencanaan pemulihan sarpras yang rusak akibat bencana	BPBD	100	25,000,000	DAU	100	25,000,000
1.05.03-2-02-09	Pembuatan Rencana Kontijensi	Presentase penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah	BPBD	100	100,000,000	DAU	100	100,000,000
1-05-03-2.03	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Prosentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		100	908,000,000	DAU	100	923,644,000

1-05-03-2.03-02	Respon cepat darurat bencana Kab / Kota	Presentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	18 Kecamatan	100	68,000,000	DAU	100	70,000,000
1-05-03-2.03-03	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kab / Kota	presentase jumlah korban bencana yang berhasil dicari, ditolong, dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	18 Kecamatan	100	260,000,000	DAU	100	263,644,000
1-05-03-2.03-04	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kab / Kota	Presentase logistik penyelamatan dan evakuasi kerban bencana Kab/Kota	BPBD	100	450,000,000	DAU	100	455,000,000
1-05-03-2.03-05	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Presentase jumlah petugas yang aktif dalam penanggulangan darurat bencana	Lokasi bencana	100	130,000,000	DAU	100	135,000,000
1-05-03-2.04	Penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Presentase Penataan sistem dasar penanggulangan bencana	BPBD	100	20,000,000	DAU	100	25,000,000
1-05-03-2.04-01	Penyusunan regulasi penanggulangan benana kab/kota	Presentase penyusunan regulasi hingga dinyatakan sah/legal	BPBD	100	20,000,000	DAU	100	25,000,000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program Utama

Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021 terdiri dari beberapa Program Utama sedangkan untuk mencapai sasaran dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana yang terurai di tabel berikut:

Program dan Kegiatan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga
Tahun 2020

NO	PROGRAM	KEGIATAN
(1)	(2)	(3)
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2	Program Penanggulangan Bencana	1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota 2. Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 4. Penataan sistem dasar penanggulangan bencana

4.2 Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran yang ingin dicapai/dihasilkan dari Rencana Kerja ini adalah dalam kurun waktu satu tahun. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

Sasaran dan Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

NO	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100 %
2	Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam menghadapi bencana	Presentase Ketahanan daerah dalam menghadapi bencana	0,51

4.3 Alokasi Anggaran

Secara keseluruhan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis 2016-2021 sebagaimana pada lampiran Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun Anggaran 2021.

BAB V

PENUTUP

Demikian Rencana Kinerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 yang disusun dan akan dijadikan pedoman dalam menunjang pelaksanaan Tupoksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga.

Pokok-pokok dan rincian kegiatan yang disusun merupakan kelanjutan, peningkatan dan perluasan dari Pelaksanaan Kegiatan tahun sebelumnya dan mengacu, berpedoman kepada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga.

Lebih lanjut Rencana Kinerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga disusun untuk dapat dijadikan pedoman bagi penjabaran tugas dan fungsi oleh segenap jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga dalam rangka mengaktualisasikan Tupoksi yang dibiayai oleh anggaran berbasis kinerja sesuai dengan rencana yang realistis serasi dan berkesinambungan.

Semoga Allah SWT selalu meridhoi apa yang telah termuat dalam Rencana Kinerja Tahun 2021 dan semoga perbuatan kita dicatat sebagai amal ibadah. Amin.

Purbalingga, September 2020

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

Drs. MUCH UMAR FAOZI, M.Kes

Pembina Tk I

NIP. 19681022 199402 1 001